



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2024

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN HASIL PERIKANAN
PANGKALPINANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 1 Oktober 2024

Kepala,

Dedy Arief Hendriyanto. S.St,Pi,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
VI. Lampiran dan Daftar	

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG

*JL. PROFESI NOMOR 4, PANGKALPINANG 33149
TELEPON (0717) 434756, FAXIMILE (0717) 426434*

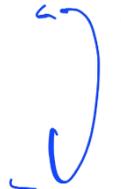
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan Pangkalpinang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 1 Oktober 2024

Kepala,



Dedy Arief Hendriyanto. S.St,Pi,M.Si
NIP 197805252000031002

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada triwulan III TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 337,240,000 atau mencapai 67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 500,000,000. Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar Rp 4,033,460,239 atau mencapai 70 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar 5,722,223,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2024. Nilai Aset per 30 September 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp12,436,385,227 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 192,527,630. Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Piutang jangka pendek sebesar Rp 293,991,431 Aset Tetap (neto) sebesar Rp12,243,857,597 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 293,991,431 dan Rp12,142,393,786.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/devisit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp (4,194,409,008) sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 4,531,649,008 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp) (4,194,409,008). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0.-dan Rp 0,- Sehingga Nilai Surplus/ Defisit-LO Sebesar Rp (4,194,409,008).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp 12,635,457,565 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (4,194,409,008) dikurangi dengan Koreksi yang mengurangi ekuitas ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3,701,345,239. Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp (493,063,769) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2024 adalah senilai Rp12,142,393,796.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2024		% thd Anggaran	TA 2023
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	500,000,000	337,240,000	67	443,962,000
Belanja	B.2				
Belanja	B.3	2,953,791,000	2,275,882,387	77	2,653,201,816
Pegawai	B.4	2,768,432,000	1,757,577,852	63	2,186,425,011
Belanja Barang	B.5	-	-		-
Belanja Modal	B.6	-	-		-
Belanja Batuan Sosial					
Jumlah Belanja		5,722,223,000	4,033,460,239	70	5,133,075,827

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Sep-24	30-Sep-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	110.843.200	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	81684430	114.709.438
Persediaan yang Belum Diregister			
Jumlah Aset Lancar		192.527.630	114.709.438
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang			-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	3.232.044.788	3.232.044.788
Peralatan dan Mesin	C.15	6.636.197.391	6.636.197.391
Gedung dan Bangunan	C.16	9.098.990.849	9.098.990.849
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	1.271.402.750	1.271.402.750
Aset Tetap Lainnya	C.18	61.180.000	61.180.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-8.055.958.181	(7.755.875.386)
Jumlah Aset Tetap		12.243.857.597	12.543.940.392
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya			-
JUMLAH ASET		12.436.385.227	12.658.649.830
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	110.843.200	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	135.185.948	23.192.265
Utang yang belum ditagihkan	C.26	47.962.283	-
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C.27	-	-
Utang Jangka Pendek lainnya			-
JUMLAH KEWAJIBAN		293.991.431	23.192.265
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	12.142.393.796	12.635.457.565
JUMLAH EKUITAS		12.142.393.796	12.635.457.565
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.436.385.227	12.658.649.830

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Sep-24	30-Sep-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	337.240.000	432.375.000
JUMLAH PENDAPATAN		337.240.000	432.375.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.369.668.335	2.763.289.220
Beban Persediaan	D.3	103.247.308	237.692.733
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.270.971.673	1.472.855.360
Beban Pemeliharaan	D.5	251.024.662	227.162.799
Beban Perjalanan Dinas	D.6	236.654.235	320.224.818
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	0	-
Beban Bantuan Sosial	D.8		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	300.082.795	365.404.855
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		4.531.649.008	5.386.629.785
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.194.409.008)	(4.954.254.785)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus /Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	9.667.853
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	11.587.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	1.919.147
Jumlah surplus/ (defisit) pelepasan aset Non lancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			-
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Jumlah beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			9.667.853
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.194.409.008)	(4.944.586.932)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban luar biasa			-
POS LUAR BIASA			-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			-
SURPLUS/DEFISIT- LO		(4.194.409.008)	(4.944.586.932)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Sep-24	30-Sep-23
EKUITAS AWAL	E.1	12.635.457.565	12.975.847.174
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.194.409.008)	(4.944.586.932)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUB KEBIJAKAN/KESALAHAN	E.3.1	-	-
MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP N	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		3.701.345.239	4.709.685.577
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(493.063.769)	(234.901.355)
EKUITAS AKHIR	E.5	12.142.393.796	12.740.945.819

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Pangkalpinang

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Merupakan salah satu UPT dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada didaerah yang terletak di Komplek Perkantoran.Kep.Bangka Belitung Jln Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149 dan membawahi 2 Wilayah Kerja yaitu Wilayah Kerja Belitung dan Muntok yang melaksanakan tindakan perkarantinaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan didaerah Provinsi Bangka Belitung dan Nasional pada umumnya memerukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor : KEP.118/BKIPM/2012 tentang Rencana Strategis BKIPM Tahun 2012-2014, Kebijakan strategis BKIPM KKP adalah:

- Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumber daya perikanan dari ancaman

hamapenyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusinya tadalan mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

- SKIPM Pangkalpinang sebagai satuan kerja BKIPM dituntut untuk mampu meningkatkan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman dikonsumsi manusia. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan system jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga

mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI

pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp

337.240.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp 337.240.000 atau mencapai 67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000. Pendapatan Kantor SKIPM Pk.Pinang terdiri dari Pendapatan Jasa (Jasa karantina) dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya, Pendapatan Jasa

Karantina Perikanan serta Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	500.000.000	363.850.000	67,00
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	390.000	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	500.000.000	364.240.000	67,00

Realisasi Pendapatan Jasa per 30 September 2024

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2024

URAIAN	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	390.000	1.370.000	28,47
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	363.850.000	431.005.000	
Jumlah	364.240.000	432.375.000	84,24

Realisasi

Belanja Negara

Rp4,033,460,2

39

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada per 30 September 2024 adalah sebesar Rp 4,033,460,239 atau 70% dari anggaran belanja sebesar Rp 5,722,223,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.953.791.000	2.275.882.387	77,05
Belanja Barang	2.768.432.000	1.757.577.852	63,49
Belanja Modal			-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5.722.223.000	4.033.460.239	70,49
Pengembalian	-		-
Jumlah	5.722.223.000	4.033.460.239	70,49

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 SEPTEMBER 2024	REALISASI 30 SEPTEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.275.882.387	2.653.201.816	(14,22)
Belanja Barang	1.757.577.852	2.186.425.011	(19,61)
Belanja Modal		293.449.000	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.033.460.239	5.133.075.827	(21,42)

Belanja

Pegawai Rp

2.275.882.387

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.275.882.387 dan Rp 2.653.201.816. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Belanja Pegawai per 30 September 2024
dan 30 September 2023*

URAIAN	REALISASI SEPTEMBER 2024	REALISASI SEPTEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,140,543,927	1,002,208,537	(12.13)
Pengembalian tunjangan fungsional	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	43,804,025	88,006,432	100.91
Belanja Honorarium			
Belanja lembur / makan	67,651,000	80,441,000	
Pengembalian belanja lembur			
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,023,883,435	1,131,458,440	10.51
Jumlah Belanja Kotor	2,275,882,387	#####	1.15

*Belanja
Barang Rp
1.757.577.852*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.757.577.852 dan Rp. 2.186.425.011.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

Nama Barang	REALISASI SEPTEMBER 2024
Belanja Barang Operasional	614,694,103
Belanja Barang Non Operasional	34,353,900
Belanja Jasa	577,803,100
Belanja Pemeliharaan	243,251,662
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	205,790,657
Belanja Barang Persediaan	81,684,430
Belanja Barang untuk diserahkan kepada	-
Jumlah Belanja Kotor	1,757,577,852
Pengembalian Belanja	-

Belanja Modal

Rp 0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp293.449.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	293.449.000	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor		293.449.000	-100,00
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	0	293.449.000	-100,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 110.843.200-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp 110.843.200 dan Rp 90.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari uang tunai yang ada di Brankas dan Uang yang ada

di Rekening, dengan rincian Uang Tunai Rp 32.842.200 dan uang yang ada di Rekening sebesar Rp 30.038.721. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan
2023*

Keterangan	30-Sep	Sep-23
Uang Tunai	32,84,,200	90,000,000
Uang di Rekening	30,038,721	-
Jumlah	62,880,921	90,000,000

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Penerimaan PNBPN langsung disetor kedalam kas negara tanpa melalui kas Bendahara Penerimaan

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan		-
Jumlah		-

*Piutang PNB
Rp0*

4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tagihan TP/TGR**
Rp0 **Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0- dan Rp0 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
TPA
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2024 dan 2023

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
Jumlah			-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0.*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang
Lancar TA 2024 dan 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Listrik	-	-
Pembayaran Telpon dan Fax	-	-
Pembayaran pengiriman Dokumen	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023.

masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan		-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		-
Jumlah		-

Persediaan Rp
81.684.430

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 81.684.430 dan Rp. 99.449.964. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	30-Sep-24	30-Sep-23
Barang Konsumsi	81.684.430	99.499.964
Barang untuk Pemeliharaan	-	80.000
Suku Cadang	-	190.000
Bahan Baku	-	406.686
Jumlah	81.684.430	100.176.650

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1			-
2			-
3			-
6			-
Jumlah			-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2024 dan 2023

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 September 2024 dan September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 . Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

Tanah
Rp3.232.044.788,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Pangkalpinang 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp 3.232.044.788 dan Rp3.232.044.788 ,-.

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2024	3,232,044,788
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 30 September 2023	3,232,044,788

Peralatan dan

Mesin

Rp6.636.197.391

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 dan 30 September 2023 Rp 6.636.197.391,- dan Rp. 6,636.197.391. Mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2024	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 September 2024	6.636.197.391
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	
Nilai Buku per 30 September 2024	6.636.197.391

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp9.098.990.849

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah Rp. 9.098.990.849. Tidak ada mutasi

tambah maupun kurang pada gedung dan bangunan.

	30-Sep-24	9.098.990.849
Mutasi tambah:		-
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan		0
Perjalanan Dinas Pembangunan Gedung dan Bangunan		0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		0
Mutasi kurang:		-
Saldo per 30 September 2024		9.098.990.849
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024		
Nilai Buku per 30 Sept 2024		9.098.990.849

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp1.271.402.750*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. Rp1.271.402.750 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2024	1.271.402.750
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	
Nilai Buku per 30 Sept 2024	1.271.402.750

*Aset Tetap
Lainnya
Rp61.180.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah Rp61.180.000 dan

Rp61.180.000. Aset tetap tersebut berupa buku untuk koleksi Perpustakaan dan ruang baca. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Septemb	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 September 2024	61.180.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Septembe	0
Nilai Buku per 30 Sept 2024	61.180.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp(8,055,958,181)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing Rp(8.055.958.181) dan Rp(7.755.875.386). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak

Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Sept 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 September 2024	-
Nilai Buku per 30 Sept 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2024

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	0

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 30	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi	-
Mutasi kurang:	
- pengguna	-
- penghapus	-
Saldo per 30	-
Akumulasi P	-
Nilai Buku p	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang Muka dari
KPPN
Rp110.843.200*

C.24 Utang Muka dari KPPN

Saldo Utang Muka dari KPPN per per 30 September 2024 Rp110.843.200. Utang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 135.185.948*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 sebesar Rp 135.185.948. Utang pihak ke 3 tersebut merupakan beban belanja untuk Gaji Bulan Oktober untuk 19 PNS, 2 oarang PPPK dan Belanja Barang Full day Meeting kegiatan Harmonisasi Persyaratan Ekspor Hasil Perikanan Gaji PNS sebesar Rp 86.710.311, belanja untuk Gaji PPNP sebesar Rp 7.075.637. dan Kegiatan full day Meeting sebesar Rp.18.000.000, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp 0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2024 dan 30 September 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
12,142.393.796

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 12,142.393.796 dan Rp.12.635.457.565. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Rp337.240.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp 337.240.000 dan Rp 443.962.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin		11,587,000	
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	230395000	431,005,000	(87)
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Tahun Lalu			
Pendapatan jasa Karantina Perikanan	390000	1,370,000	(251)
Jumlah	230785000	443,962,000	(92)

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp

2.275.862.667

Jumlah Beban Pegawai pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.275.862.667 dan Rp 2.653.201.816. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal..

Rincian Beban Pegawai per 30 September 2024 dan 30 September 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	862446600	1006431500	(17)
Beban Tunjangan-tunjangan	1240985067	1393017316	(12)
Beban Uang makan	113907000	173312000	(52)
Beban Uang Lembur	58524000	80441000	(37)
Jumlah	2275862667	2,653,201,816	(17)

Beban

Persediaan

Rp81.684.430

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 81.684.430 dan 114.709.438. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	81684430	114,709,438	(40)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			
Beban persediaan suku cadang			
Beban Persediaan Lainnya			
Beban persediaan bahan baku			
Beban Persediaan Rusak/Usang		-	
Jumlah	81684430	114,709,438	(40)

Beban Barang dan Jasa Rp 1.270.971.673

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.270.971.673 dan Rp 1.472.855.360. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	355,635,896	482,042,678	(26.22)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	31,680,000	85,536,000	(62.96)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,299,134	5,644,667	11.59
Beban Honor Operasional Satker	46,704,000	78,672,000	(40.63)
Beban Barang Operasional Lainnya	34,353,900	51,838,400	(33.73)
Beban Barang operasional - Penanganan Pandemi COVID 19			
Beban Bahan	5,435,400	24,650,500	(77.95)
Beban Honor Output Kegiatan	3,264,000	5,440,000	(40.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya		36,500,000	(100.00)
Beban Langganan Listrik	149,955,682	138,310,834	8.42
Beban Langganan Telpon	159,121	423,510	(62.43)
Beban Langganan Air	0	0	0.00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0.00
Beban sewa	32,915,000	25,000,000	31.66
Beban Jasa Profesi	0	0	0.00
Beban Jasa Lainnya	577,803,100	501,550,000	15.20
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID	0	0	0.00
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Aset Peralatan dan Mesin	26,766,440	37,246,771	0.00
Jumlah	1,270,971,673	1,472,855,360	(13.71)

Beban

Pemeliharaan

Rp 251.024.662

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 251.024.662 dan 227.162.799. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	153,304,306	135,702,349	12.97
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89,947,356	85,545,450	5.15
Beban bahan bakar minyak dan pelumas (BM)	0	0	0.00
Beban pemeliharaan Jaringan	0	0	0.00
Beban Persediaan bahan utk pemeliharaan	7,773,000	5,915,000	31.41
Beban Persediaan suku cadang			0.00
Jumlah	251,024,662	227,162,799	50

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
236.654.235*

Beban Perjalanan Dinas 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 236.654.235 dan Rp 320.224.818. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	185,809,186	249,016,972	-25.38
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,000,000	9,280,000	40.09
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,863,578	15,729,700	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,981,471	46,198,146	-84.89
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah	236,654,235	320,224,818	(70)

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada MasyarakatTA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		0	0.00
Beban Persediaan pita,cukai, materai dan legas		0	0.00
Jumlah		0	0.00

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	TH 2021
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		0	0
Jumlah		0	0

Beban

Penyusutan dan Amortisasi Rp300,082,795

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 300,082,795 dan Rp 365.404.855. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Sep-24	30-Sep-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan	154,552,044	219,874,104	(30)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	96,983,857	96,983,857	-
Beban penyusutan Jalan dan Jembatan	41,317,688	41,317,688	-
Beban Penyusutan Irigasi	5,983,243	5,983,243	-
Beban Penyusutan Jaringan	1,245,963	1,245,963	-
Beban Penyusutan Aset tetap yg tidak di gunakan			-
Penyusutan	300,082,795	365,404,855	(18)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0.00
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0.00
Beban Persediaan Rusak/Usang *)	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0.00

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa

Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp

12.635.457.565

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp12.635.457.565 dan Rp 12.975.847.147.

Defisit LO

Rp

(4.194.409.008)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp (4.194.409.008) dan Rp (4.944.586.932). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi		
Koreksi nilai persediaan	-		
Suku Cadang	-		
Jumlah	-		

Selisih

Revaluasi Aset

TetapRp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan

karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi aset tetap	-
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas Rp
3.701.345.239*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp 3.701.335.239 dan Rp 4.709.685.577 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2024, DDEL sebesar Rp 0 sedangkan DKEL sebesar Rp 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp 3.075.000 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	sertifikat kesehatan HC (Kode D)	Sekretariat BKIPM	-
2	sertifikat kesehatan HC (KID12)	Sekretariat BKIPM	-
3	sertifikat kesehatan HC (KID1)	Sekretariat BKIPM	3,075,000
	Jumlah		3,075,000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung

sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 Rp0. dari total Rp0,- .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Kabupaten Belit	Tanah	
2	erintah Provinsi Bangka Bel	Tanah	
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp12,142.393.7

96

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 12,142.393.796 dan 12.740.945.819

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2024 terdapat beberapa pengungkapan yaitu;

- a. Terdapat Revisi DIPA selama Tahun Anggaran 2024 sebanyak 10 kali, sampai dengan 30 September 2024
- b. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2024 sebesar 4.033.460.239.
- c. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2024 senilai Rp 337.240.000.
- d. Terdapat penambahan pegawai 1 PNS dan 1 PPPK

